



Orang Tua Korban Pilih Jalur Hukum

YOGYAKARTA, Joglo Jogja - Gelombang aduan dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bertambah. Hingga Rabu (6/5), tercatat sebanyak 187 laporan telah masuk melalui kanal pengaduan yang dibuka Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Kasus itu kini memasuki babak baru dengan pengerahan tim hukum masif untuk mengawal para korban.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Retnaningtyas mengungkapkan, data pelapor tersebut terdiri dari orang tua siswa aktif hingga para alumni yang pernah menitipkan anaknya di lembaga tersebut.

"Pengawasan hukum ini menjadi krusial karena jumlah pelapor terus bertambah. Tim kami siapkan untuk memastikan keadilan bagi anak maupun orang tua," tegas Retnaningtyas, kemarin (6/5).

Senada, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Yogyakarta, Udiyati Ardiani menjelaskan dari ratusan aduan tersebut, sebanyak 130 orang tua telah menjalani proses asesmen. Hasilnya, sekitar 40 hingga 50 orang tua membulatkan tekad untuk menyeret kasus ini ke ranah hukum.

"Hari ini sudah mulai dibuatkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Mereka yang melapor tidak hanya dari kejadian baru-baru ini, tapi ada juga orang tua dari anak yang sudah lulus," jelas Udiyati. Tak main-main, Pemkot Yogyakarta menerjunkan sedikitnya 28 advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Peduli Anak Kota Yogyakarta. Tim ini merupakan kolaborasi lintas unsur, mulai dari Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Peradi Kota Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), hingga lembaga swadaya masyarakat seperti Rifka Annisa.

Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Yogyakarta, Saverius

Vanny menekankan, seluruh pendampingan hukum ini diberikan secara gratis alias pro bono. Fokusnya adalah mengawal perkara hingga memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

Vanny menyebut ada tiga poin utama yang menjadi bidikan tim hukum. Pertama, memastikan pertanggungjawaban personal dari pihak pengasuh maupun kepala sekolah secara maksimal. Hal ini didasari dugaan pelanggaran berlapis, mulai dari UU Perlindungan Anak, KUHP, hingga UU Kesehatan.

"Kami juga menyoroti pertanggungjawaban secara kelembagaan atau badan hukumnya," imbuh Vanny.

Selain jalur hukum, fokus utama saat ini adalah pemulihan trauma. UPT PPA memastikan pendampingan psikologis akan diberikan secara berkelanjutan bagi anak-anak korban maupun orang tua mereka yang terdampak secara mental akibat insiden ini. (eri/bid/wa)



DITUTUP: Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo saat meninjau lokasi Daycare Little Aresha, beberapa waktu lalu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 16 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005